LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-18/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. Bentuk Surat Permohonan

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
.....

Berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIK/No Paspor : .....
NPWP : .....
Alamat : .....
Telepon : .....

dengan ini menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) atau hasil cetakan sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

NOP : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
untuk dilakukan penelitian.

Bersama ini terlampir dokumen sebagai berikut:
1. SSP dan fotokopinya yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos(NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP) atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP, yang telah dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (dalam hal telah memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP)*;
2. surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang telah diisi secara lengkap dan dibubuhi meterai;
3. fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas meterai [1];
4. fotokopi SPPT PBB/bukti penagihan PBB lainnya untuk tahun terakhir *;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Indonesia;
6. fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Asing;
7. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen [2];
8. fotokopi brosur, *price list* dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) [3];
9. surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pajak Wajib Pajak [4];

dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan kepada *Spesial Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, terlampir tambahan dokumen sebagai

berikut:

1. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK [5];
2. keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu [5];
3. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu [5].

Demikian disampaikan.

....., ...20.....
Wajib Pajak/kuasanya,

Tanda Tangan

Wajib Pajak/kuasanya,
NPWP .....

Keterangan:
* coret yang tidak perlu;

B. Petunjuk pengisian

1. dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara penjualan atau tukar menukar dengan menambahkan pembayaran;
2. dalam hal pengajuan penelitian dikuasakan;
3. dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengembang perumahan;
4. dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan kepada *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema KIK tertentu.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

JERRY FADLINSYAH
NIP 197601081996031001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-18/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. Bentuk Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ..... [1]
Jabatan : ..... [2*]
NIK/No Paspor : ..... [3]
NPWP : ..... [4]
Alamat : ..... [5]
..... [5]
Telepon : ..... [6]
selaku pengurus dari:
Nama Badan Usaha : ..... [7*]
Nomor Akta Pendirian : ..... [8*]
NPWP Badan Usaha : ..... [9*]
Alamat : ..... [10*]
..... [10*]
Telepon : ..... [11*]

dalam hal ini sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/ atau bangunan, dan
Nama : ..... [12]
Jabatan : ..... [13*]
NIK/No Paspor : ..... [14]
NPWP : ..... [15]
Alamat : ..... [16]
..... [16]
Telepon : ..... [17]
selaku pengurus dari :
Nama Badan Usaha : ..... [18*]
Nomor Akta Pendirian : ..... [19*]
NPWP Badan Usaha : ..... [20*]
Alamat : ..... [21*]
..... [21*]
Telepon : ..... [22*]

dalam hal ini sebagai pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.

Pada tanggal .....[23] telah melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan [24] *, melalui jual beli tanpa hubungan istimewa/jual beli dengan hubungan istimewa/tukar menukar/cara lain [24] * dengan keterangan tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:
Nomor Objek Pajak : ..... [25*]
Nomor Identifikasi Bidang : ..... [26*]
Koordinat : ..... [27*]
Alamat : ..... [28]
Desa/Kelurahan : ..... [28]
Kecamatan : ..... [28]
Kabupaten/Kota : ..... [28]
Luas tanah : ..... [29]
Luas bangunan : ..... [30]
Harga (terbilang) : ..... [31]
Tarif PPh : ..... [32]
Jumlah PPh : ..... (*terbilang*) [33]

Cara pembayaran : transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain [34]*
Nomor rekening : ..... [35]
Bank : ..... [36]
Nama pemilik rekening : ..... [37]
Nama Notaris/PPAT : ..... [38]*
Register Noteris/PPAT : ..... [39]*
NPWP Notaris/PPAT : ..... [40]*

Denah Lokasi Objek Pajak	Foto Objek Pajak
41	42

Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

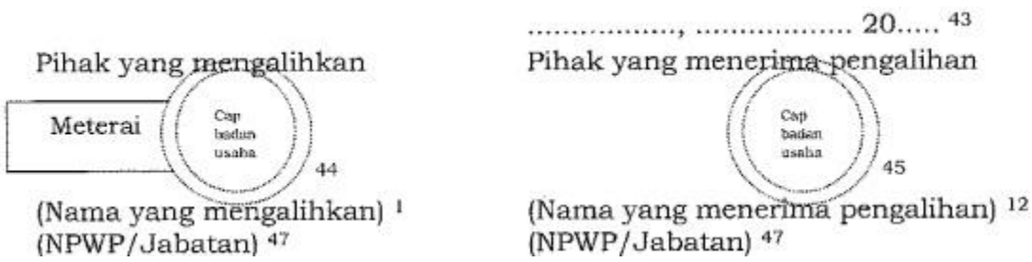

Mengetahui Notaris/PPAT

(Nama Notaris/PPAT) 38

Keterangan (*);
1. Nomor 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21 dan 22 diisi dalam hal pengalihan oleh atau kepada Badan Usaha;
2. Nomor 24 coret yang tidak perlu;
3. Nomor 25 diisi dengan NOP induk dalam hal NOP belum dipecah;
4. Nomor 25 diisi dalam hal tanah dan/atau bangunan sudah bersertifikat;
5. Nomor 27 diisi dalam hal Wajib Pajak mengetahui koordinat lokasi tanah dan/atau bangunan;
6. Nomor 38, 39, 40 wajib diisi dengan nama, register dan NPWP PPAT untuk transaksi penjualan atas tanah dan/atau bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) atau diisi nama, register dan NPWP Notaris dalam hal adendum PPJB dilakukan melalui Notaris.

B. Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan:

1. Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau nama pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
2. Diisi dengan jabatan pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
3. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
5. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan sesuai Kartu Tanda Penduduk atau Paspor.
6. Diisi dengan nomor telepon atau *mobile phone* pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
7. Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
8. Diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
9. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
10. Diisi dengan alamat badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
11. Diisi dengan nomor telepon badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
12. Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau nama pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
13. Diisi dengan jabatan pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
14. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.

15. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
16. Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah, dan/atau bangunan sesuai Kartu Tanda Penduduk atau Paspor.
17. Diisi dengan nomor telepon atau mobile phone pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
18. Diisi dengan nama badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
19. Diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
20. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
21. Diisi dengan alamat badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
22. Diisi dengan nomor telepon badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
23. Diisi dengan tanggal transaksi.
24. Diisi dengan cara pengalihan hak, dalam hal menggunakan cara lain wajib menyebutkan caranya.
25. Diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
26. Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah, dalam hal tanah dan/atau bangunan sudah bersertifikat.
27. Diisi dengan titik koordinat letak tanah dan/atau bangunan dengan format bujur dan lintang (isian opsional).
28. Diisi dengan alamat lengkap tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
29. Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
30. Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
31. Diisi dengan harga transaksi dalam nominal rupiah disertai dengan terbilang.
32. Diisi dengan tarif PPh yang digunakan.
33. Diisi dengan jumlah PPh yang disetor oleh Wajib Pajak dalam nominal rupiah disertai dengan terbilang.
34. Diisi dengan cara pembayaran, dalam hal menggunakan cara lain wajib menyebutkan caranya.
35. Diisi dengan nomor rekening tujuan penerimaan pembayaran dalam hal sebagaian atau seluruh pembayaran menggunakan cara pembayaran transfer.
36. Diisi dengan nama Bank tujuan penerimaan pembayaran dalam hal sebagaian atau seluruh pembayaran menggunakan cara pembayaran transfer.
37. Diisi dengan nama pemilik rekening Bank tujuan penerimaan pembayaran dalam hal sebagaian atau seluruh pembayaran menggunakan cara pembayaran transfer.
38. Diisi dengan nama Notaris/PPAT .
39. Diisi dengan register Notaris/PPAT.
40. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris/PPAT.
41. Gambar denah lokasi Objek Pajak.
42. Foto Objek Pajak.
43. Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
44. Stempel badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dalam hal pengalihan oleh badan usaha.
45. Stempel badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan dalam hal pengalihan oleh badan usaha.
46. Paraf pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada halaman pertama surat pernyataan dalam hal surat pernyataan lebih dari 1 (satu) halaman.
47. Diisi NPWP dalam hal pengalihan dari atau kepada orang pribadi, dan diisi jabatan dalam hal pengalihan dari atau kepada badan usaha

Keterangan Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan;
Semua isian wajib diisi kecuali koordinat.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

JERRY FADLINSYAH
NIP 197601081996031001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-18/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PERNYATAAN TIDAK WAJIB MENGGUNAKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

A. Bentuk Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	..... [1]
NIK/No Paspor	:	..... [2]
Status	:	Kawin/Tidak Kawin*
Jumlah Tanggungan	:	..... [3]
Alamat	:	..... [4]
		..... [4]
Telepon	:	..... [5]

telah menyetorkan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan * tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, karena:

☐ selama tahun ..... [6] memiliki penghasilan sebesar Rp ..... [7],**

☐ merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.**

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...20....[8]
Yang membuat pernyataan

Meterai 9

(Nama yang membuat pernyataan)[1]

Keterangan:
* coret yang tidak perlu
** pilih salah satu

B. Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan:

1. Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor yang membuat pernyataan.
3. Diisi dengan jumlah tanggungan, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
4. Diisi dengan alamat yang membuat pernyataan.
5. Diisi dengan nomor telepon atau *mobile phone* yang membuat pernyataan.
6. Diisi dengan tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
7. Diisi dengan jumlah penghasilan dalam satu tahun selama tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
8. Diisi dengan tanggal surat pernyataan.
9. Tanda tangan yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

JERRY FADLINSYAH
NIP 197601081996031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-18/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. Bentuk Surat Keterangan Penelitian Formal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
Nomor : ..... [1]

TELAH DITELITI

A. Identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak
Nama Wajib Pajak : ..... [2]
NPWP : ..... [3]
Alamat Wajib Pajak : ..... [4]
..... [4]
Nomor Objek Pajak : ..... [5]
Alamat Objek Pajak : ..... [6]
..... [6]
Luas Tanah/Bangunan : ..... [7]

B. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh
Kode Akun Pajak : ..... [8]
Kode Jenis Setoran : ..... [9]
Jumlah Pembayaran : ..... [10]
Jumlah SSP : ..... [11]

(Nomor BPS) [12] [13]	....., ...20.....[14] a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP [15] 16 (Nama) [17] (NIP) [18] Cap Kantor [19]

Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Dipungut Biaya

Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya

B. Bentuk Lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal

Lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan
Nomor : .....[1]
Tanggal : .....[14]

No	Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	NTPN
1.	20	10	21
2.			
...			
dst.			

C. Petunjuk Surat Keterangan Penelitian Formal:

1. Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
2. Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
6. Diisi dengan alamat Objek Pajak.
7. Diisi dengan luas tanah dan/atau bangunan.
8. Diisi dengan Kode Akun Pajak.
9. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
10. Diisi dengan jumlah pembayaran.
11. Diisi dengan jumlah Surat Setoran Pajak yang dilakukan penelitian.
12. Diisi dengan Nomor Bukti Penerimaan Surat.
13. *Quick Response Code.*
14. Diisi dengan tanggal Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
15. Paraf petugas peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
16. Tanda tangan pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
17. Nama pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
18. NIP pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
19. Stempel Kantor Pelayanan Pajak.
20. Diisi dengan masa pajak.
21. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan.

Keterangan Petunjuk Surat Keterangan Penelitian Formal:
Dalam hal permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dilampiri lebih dari 1 (satu) SSP atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP, maka isian nomor 10, 11, dan 12 pada Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan diisi "terlampir" dan detail setiap SSP diisikan pada lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

JERRY FADLINSYAH
NIP 197601081996031001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-18/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI

A. Bentuk Surat Pemberitahuan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..... [1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... [2]
.....

Nomor : ..... [3]
Lampiran : ..... [4]
Perihal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

Yth. ..... [5]
NPWP .....
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....[6] tanggal ..... [7] hal .....[8], dengan ini disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan [9]	
		Ada	Tidak Ada
1	SSP yang sudah tertera NTPN dan NTB/NTP/NPP atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP		
2	surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang telah diisi secara lengkap dan dibubuhi meterai		
3	fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas meterai		
4	fotokopi SPPT PBB atau bukti penagihan PBB lainnya untuk tahun terakhir		
5	fotokopi KTP atau Paspor pembeli dan penjual		
6	surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen (opsional)		
7	fotokopi brosur, *price list,* dan PPJB (opsional)		
8	surat pernyataan tidak wajib menggunakan NPWP (opsional)		
9	fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK (opsional)		
10	keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		
11	surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		

b. kesesuaian data penelitian formal

No	Uraian Kesesuaian Data	Keterangan [10]	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP atau Paspor		
2	jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan PPh yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan		
3	kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah PPh yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara		

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.

....., ...[11]
a.n. Kepala Kantor,
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2P

.....
NIP .....[12]

B. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan:

1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
2. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
3. Diisi dengan nomor surat.
4. Diisi dengan lampiran surat.
5. Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, NPWP dan alamat.
6. Diisi dengan nomor surat wajib pajak.
7. Diisi dengan tanggal surat wajib pajak.
8. Diisi dengan perihal surat wajib pajak.
9. Diisi dengan checklist (√) keterangan kelengkapan dokumen.
10. Diisi dengan checklist (√) keterangan kesesuaian data.
11. Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
12. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

JERRY FADLINSYAH
NIP 197601081996031001